

# Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara

Mukhlisul Muzahid<sup>1</sup>, M. Yazid AR<sup>2</sup>, Rusdy<sup>3</sup>, Dasmi Husin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Tata Niaga, Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. Banda Aceh Medan Km. 280 Buketrata 24301INDONESIA

<sup>1</sup>soel\_mz23@yahoo.com

**Abstrak**–Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Alat analisis yang digunakan adalah teknik analisa jalur (*path analysis*) dengan pertimbangan bahwa pola hubungan antar variabel dalam penelitian adalah bersifat korelatif dan kausalitas. Model ini akan mampu menjawab bentuk permasalahan yang selama ini terjadi sehingga tujuan dapat tercapai yaitu mengukur seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan secara simultan maupun secara parsial pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Responden yang dituju adalah setiap kepala SKPD di Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 40 responden, karena diyakini bahwa mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab atas akuntabilitas keuangan SKPD yang mereka pimpin. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari responden yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan, dan secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan satuan kerja perangkat daerah kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya aparatur pemerintah kabupaten Aceh Utara agar meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan akuntabilitas keuangan.

Kata kunci : *SAKD, Aktivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Keuangan.*

**Abstract**–This study aims to empirically examine the effect of the application of the Regional Financial Accounting System and Control Activities to Financial Accountability in the Regional Work Unit of North Aceh Regency. The analytical tool used is a path analysis technique with the consideration that the pattern of relationships between variables in the study is correlative and causality. This model will be able to answer the form of problems that have occurred so that the goal can be achieved, namely to measure how much influence the Regional Financial Accounting System and Control Activities on Financial Accountability simultaneously or partially on the North Aceh Regency SKPD. The intended respondents were each head of SKPD in North Aceh District, which totaled 40 respondents, because it was believed that they had the ability and responsibility for the financial accountability of the SKPD they led. The data sources used in this study are primary and secondary data. Primary data sources come from respondents obtained using data collection techniques through questionnaires and interviews. The results of this study indicate that simultaneous regional financial accounting systems and control activities affect financial accountability, and partially regional financial accounting systems and control activities have a positive effect on the financial accountability of North Aceh district work units. The results of this study are expected to be a reference and consideration for local governments, especially the North Aceh district government apparatus in order to increase competence in the implementation of financial accountability.

Keywords : *SAKD, Financial Control and Accountability Activities.*

## I. PENDAHULUAN

### *Latar Belakang Penelitian*

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2012). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa keuangan yang lebih adil, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Membangun sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintahan Daerah merupakan salah satu solusi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, baik transaksi yang berkaitan dengan anggaran, operasi

maupun aset, kewajiban dan ekuitas, sehingga pada akhir periode dapat dihasilkan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan ini juga diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (auditable) sehingga memudahkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan.

Reformasi pengelolaan sektor publik dengan menggantikan administrasi tradisional dan beralih ke New Public Management (NPM), yang memberi perhatian lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas, dengan mengadopsi teknik pengelolaan sektor swasta ke dalam sektor publik yakni pemerintahan. Penerapan NPM dipandang sebagai suatu bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi.

Menurut BPK (2010), masih banyaknya opini TMP dan TW yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. Kelemahan pengendalian intern atas pemerintah daerah sebagian besar karena belum memadainya unsur lingkungan pengendalian dan aktivitas pengendalian. Lingkungan

pengendalian yang diciptakan seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI. Namun, masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian terlihat dari kurang dipahaminya tugas pokok dan fungsi pada satuan kerja serta kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan. Sedangkan, kelemahan atas aktivitas pengendalian tercermin dari belum memadainya pengendalian fisik atas aset, pencatatan transaksi yang akurat dan tepat waktu, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan pendokumentasian yang baik atas sistem pengendalian intern, transaksi, dan kejadian penting.

Menurut Indra Bastian (2010:259), Permendagri No. 13/2006 lebih memunculkan birokrasi administrasi yang terlalu rumit. Contohnya, verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dikaitkan dengan Penerbitan SPD maupun SP2D. Menurutnya, fungsi verifikasi sudah ditangan oleh pegawai subbagian verifikasi, dan diperkuat oleh audit Inspektorat maupun auditor eksternal.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan negara yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah dalam hubungannya dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, hakekat otonomi daerah harus tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Akuntabilitas dapat dikaitkan dengan reformasi saat ini yang menghendaki pemberantasan KKN, khususnya korupsi (Abdul Halim, 2008:255). Hal senada dikatakan oleh Agus Dwiyanto, dkk (2003) bahwa keberadaan praktik KKN dapat menjadi indikator dari rendahnya akuntabilitas pemerintah kabupaten dan kota yang menjadi salah satu ciri penting dari tata pemerintahan yang baik. Kegagalan dalam mengurangi praktik KKN menunjukkan bahwa pemerintah daerah gagal mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Fenomena terkini di sektor publik dan pemerintahan masih rendahnya kualitas laporan keuangan dan juga masih rendah kualitas hasil audit oleh auditor pemerintah (inspektorat) atas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya temuan audit yang tidak ditemukan atau dideteksi oleh auditor inspektorat, akan tetapi ditemukan oleh auditor eksternal lainnya yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah belum diterapkan secara sempurna di pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas keuangan disektor pemerintah.

Dari beberapa hasil penelitian dan fenomena yang telah dipaparkan tersebut maka penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan objek penelitian pada sistem informasi akuntansi dan aktivitas pengendalian. Peneliti tertarik dengan sistem informasi akuntansi dan aktivitas pengendalian dikarenakan variabel tersebut merupakan reformasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan.

#### *Perumusan Masalah*

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara Simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
2. Seberapa besar Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara Parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

#### *Tujuan Penelitian*

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui :

1. Besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara Simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.
2. Besarnya Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara Parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara.

#### *Manfaat Penelitian*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi akuntansi khususnya pada bidang keuangan daerah, selain itu penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparatur pemerintah di kabupaten Aceh Utara, dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan.
- b. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan.

## II. Tinjauan Kepustakaan

### *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah*

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 diganti Permendagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah: "Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporann keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Tujuan utama dari sistem akuntansi merupakan pemberian serangkaian informasi yang bersifat keuangan yang akan dipakai oleh pihak pemakai. Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait

dengan pengendalian manajemen (management control).

- Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Tujuan laporan keuangan pemerintahan berdasarkan *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* dalam Dadang Suwanda (2015), *Concept Statement No.1* adalah sebagai berikut:

“Financial reporting is used in making economic, social, and political decision, and in assessing accountability primarily by; (a) comparing actual result with the legally adopted budget, (b) assessing financial condition and result of operation, assisting in determining compliance with finance-related laws, rules and regulations and (c) assisting in evaluating efficiency and effectiveness”.

Bahtiar Arif, dkk (2009) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah memberikan informasi keuangan kepada para penggunanya dalam rangka pengambilan keputusannya. Selain itu, tujuan akuntansi pemerintahan adalah untuk akuntabilitas, manajerial, pengawasan dan pemeriksaan.

#### *Aktivitas Pengendalian*

Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen adalah mengenai motivasi, organisasi dan memimpin suatu tim yang terdiri dari orang-orang dengan aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Aktivitas Pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur untuk melakukan kegiatan, mengidentifikasi risiko dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Arens et. al (2015) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran. Aktivitas Pengendalian menurut COSO adalah sebagai berikut:

*“Control activities are the policies and procedures that help ensure management directives are carried out. They help ensure that necessary actions are taken to address risks to achievement of the entity's objectives. Control activities occur throughout the organization, at all levels and in all functions.”*

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan perintah manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian terdapat pada seluruh tingkatan dan seluruh fungsi organisasi

#### Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Abdul Halim, dkk, 2007:81).

Dalam konteks organisasi pemerintah akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim (2012) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas keuangan menekankan pada pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan transparan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang menunjukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran. Dengan demikian akuntabilitas keuangan harus berisi pengungkapan penilaian kinerja keuangan dari aspek ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta pengungkapan penilaian pencapaian tujuan (output) yang telah dibiayai, dengan manfaat yang dirasakan atas pencapaian tujuan tersebut (outcome).

#### *Kerangka Pemikiran*

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan paradigma baru dalam reformasi manajemen sektor publik guna mewujudkan pemerintahan yang bersih. Dalam berbagai teori, pemerintahan yang baik harus dibangun mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, maka paradigma dengan mengubah sistem anggaran, mengubah sistem akuntansi, membentuk pemerintah regional, dan memperbaharui sistem pemilihan dengan tujuan pemerintahan yang lebih baik merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh perangkat pemerintah.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan (institusional reform) dan reformasi manajemen publik (public management reform) reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur dan infrastrukturnya.

Reformasi akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah dilakukan perubahan pelaksanaan akuntansi keuangan pemerintah dari single entry menjadi double entry bookkeeping dan perubahan teknik atau sistem akuntansi berbasis kas menjadi berbasis accrual. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan

dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan perwujudan good public governance, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi untuk diterapkan karena pengaplikasian double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang auditable sehingga memudahkan untuk pengawasan dan pengendalian.

Hipotesis

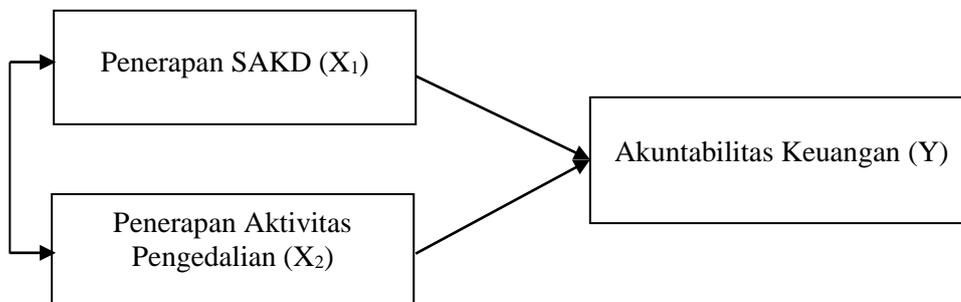
Berdasarkan struktur penelitian diatas maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 :

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara.

Hipotesis 2 :

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian secara parsial berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1 Model Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis melalui populasi target yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Terkait hipotesis yang diajukan, penelitian ini menggunakan olahan statistik untuk menjelaskan hubungan antar variabel independen (SAKD dan Aktivitas Pengendalian) serta pengaruhnya baik secara parsial maupun secara simultan terhadap variabel dependen (Akuntabilitas Keuangan) guna memperoleh bukti empiris dengan menggunakan model analisis path (path analysis).

Unit analisis penelitian ini adalah setiap kantor SKPD Kabupaten Aceh Utara dengan respondennya adalah setiap kepala SKPD Kabupaten Aceh Utara. Dilihat dari periode waktu, penelitian ini bersifat cross-sectional studies.

Populasi dan Sensus

Populasi dari penelitian ini yang sekaligus sebagai unit analisis adalah kepala SKPD yang menjadi penanggungjawab dari laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 40 orang. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode sensus.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengumpulan data yaitu, penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan metode penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer dengan kuesioner dan interview.

Metode Pengujian Data

Keandalan (reliability) atau kesahihan (validity) suatu penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Apabila alat ukur yang dipakai tidak valid dan

atau tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang dilakukan tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Kejujuran responden dalam menjawab pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner merupakan hal yang penting, untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu uji kesahihan (test of validity) dan uji keandalan (test of reliability).

Nilai *Cutt Off* (nilai baku minimal) koefisien korelasi (r) yaitu 0,3. yang artinya bahwa jika koefisien korelasi spearman rho suatu data dalam sebuah pertanyaan kuesioner sama atau lebih besar dari 0,3 maka data kuesioner tersebut dinyatakan memenuhi syarat kriteria atau disebut valid. Uji reliabilitas data penelitian ini menggunakan metode (rumusan) koefisien *Alpha Cronbach's*. koefisien *Alpha Cronbach's* merupakan koefisien reliabilitas yang paling sering digunakan dengan alasan koefisien ini menggambarkan varians dari item-item sekaligus untuk mengevaluasi *internal consistency*, adapun ukuran yang disarankan sebagai dasar secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel) adalah apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70.

Metode Analisis Data

Untuk mengukur seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah aparat, penerapan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan fungsional terhadap laporan akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengujian dengan teknik analisis jalur (path analysis). Alasan penggunaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini karena variabel independen berjumlah lebih dari satu variabel.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka model persamaan regresi berganda untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

**Keterangan :**

- Y = Akuntabilitas Keuangan
- $\beta_0$  = Koefisien *intercept* (konstanta) nilai Y jika yang lain adalah nol
- $\beta_1$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$
- $\beta_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$
- $X_1$  = Sistem akuntansi keuangan daerah
- $X_2$  = Aktivitas pengendalian
- $\varepsilon$  = *Error term* dari variabel-variabel lain

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ), Aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) ( $X_3$ ) secara **bersama-sama** berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y).

- Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan Uji Statistik F, dengan prosedur perhitungan sebagai berikut :

$$JK \text{ sisa} = \sum (Y - \hat{Y})^2$$

$$JK \text{ total} = \sum (Y - \bar{Y})^2$$

$$JK \text{ regresi} = JK \text{ total} - JK \text{ sisa}$$

$$RJK = JK/db$$

$$F\text{-hitung} = RJK \text{ regresi} / RJK \text{ sisa}$$

Dengan demikian, dalam penelitian ini asumsi model regresi yang akan diuji adalah pengujian *disturbance error* (normalitas), heteroskedastisitas dan multikolinieritas. Berikut ini akan diuraikan tentang asumsi model regresi yang akan diuji:

**Pengujian Hipotesis**

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis statistik sebagai berikut :

- Hipotesis Pertama:

**$H_{01} : \beta_i = 0, (i = 1,2,)$**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ), Aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) ( $X_3$ ) secara **bersama-sama** tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y).

**$H_{A1} : \text{Sekurang-kurangnya ada satu } \beta_i \neq 0, (i = 1,2,)$**

**Keterangan:**

JK= Jumlah kuadrat, RJK = Rata-rata jumlah kuadrat, k = jumlah variabel bebas, n = jumlah sampel dan db = derajat bebas.

Selanjutnya untuk pengujian hipotesis digunakan alat analisis varian, untuk lebih jelas dapat kita lihat melalui tabel Analisis Varians (ANOVA) sebagai berikut :

Tabel I  
Analisis Varians (ANOVA)

| Sumber Varians | Derajat bebas (db) | JK         | RJK         | F <sub>hitung</sub> |
|----------------|--------------------|------------|-------------|---------------------|
| Regresi        | K                  | JK regresi | RJK regresi | (*)                 |
| Residu         | n - k - 1          | JK sisa    | RJK sisa    |                     |
| Total          | n - 1              | JK total   | RJK total   |                     |

- Hasil perhitungan ( $F_{hitung}$ ) kemudian dibandingkan dengan nilai ( $F_{tabel}$ ) dengan tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan kriteria keputusan:

- Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel} : H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} : H_1$  diterima atau  $H_0$  ditolak

□ **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi diperoleh dari tabel ANOVA dengan menggunakan rumus;

$$R^2 = \frac{JK_{regresi}}{JK_{total}}$$

JK : Jumlah Kuadrat

- Hipotesis Kedua :

**$H_{02} : \beta_i \leq 0, (i = 1,2)$**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ), Aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) ( $X_3$ ) secara **parsial** tidak berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y).

**$H_{A2} : \beta_i > 0, (i = 1,2)$**

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ), Aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) ( $X_3$ ) secara **parsial** berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Y).

- Hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan Uji Statistik t, yaitu dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada tingkat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), dengan kriteria keputusan:

- Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel} : H_{02}$  diterima atau  $H_{A2}$  ditolak
- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel} : H_{A2}$  diterima atau  $H_{02}$  ditolak

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

*Data Responden*

Penelitian ini memilih responden yaitu kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang menjadi penanggungjawab dari laporan keuangan SKPD di Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Kuesioner yang disebarkan kepada responden sebanyak 40 eksemplar dengan tingkat pengembalian sebanyak 38 eksemplar atau 95 persen. Berdasarkan data hasil pengolahan kuesioner tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penanggungjawab akuntabilitas keuangan pada Satuan kerja perangkat daerah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh laki-laki dari pada perempuan, yaitu 32 laki-laki atau 84% dan 6 responden perempuan atau 16%. Dari latar belakang pendidikan responden menunjukkan bahwa responden berlatar belakang pendidikan ekonomi/ keuangan sebanyak 22 responden atau 58%, hukum 5 orang atau 13%, teknik 2 orang atau 5% dan selebihnya berlatar belakang pendidikan sosial dan lainnya 9 orang atau 24%, ini menunjukkan bahwa penanggungjawab akuntabilitas keuangan didominasi berpendidikan ekonomi dan keuangan.

Tabel II  
Karakteristik Responden

| No | Jumlah Responden            | Frekuensi | Persentase |
|----|-----------------------------|-----------|------------|
| 1  | Jenis kelamin               |           |            |
|    | Laki-laki                   | 32        | 84%        |
|    | Perempuan                   | 06        | 16%        |
|    | Jumlah                      | 38        | 100%       |
| 2  | Latar Belakang Pendidikan   |           |            |
|    | Ekonomi / Keuangan          | 22        | 58%        |
|    | Hukum                       | 5         | 13%        |
|    | Teknik                      | 2         | 05%        |
|    | Sosial / Lainnya            | 9         | 24%        |
|    | Jumlah                      | 38        | 100%       |
| 3  | Pendidikan Terakhir         |           |            |
|    | Diploma                     | 6         | 16%        |
|    | Strata 1                    | 21        | 55%        |
|    | Strata 2                    | 11        | 29%        |
|    | Jumlah                      | 38        | 100%       |
| 4  | Jabatan                     |           |            |
|    | Kepala/ Sekretaris Instansi | 17        | 45%        |
|    | Kabid/ Kabag                | 11        | 29%        |
|    | Jabatan lain                | 10        | 26%        |
|    | Jumlah                      | 38        | 100%       |
| 5  | Lama bekerja                |           |            |
|    | 01-05 tahun                 | 0         | 0%         |
|    | 06-10 tahun                 | 3         | 08%        |
|    | 11-15 tahun                 | 8         | 21%        |
|    | >16 tahun                   | 27        | 71%        |
|    | Jumlah                      | 38        | 100%       |

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Data responden dari segi pendidikan terakhir menunjukkan bahwa jumlah responden yang berpendidikan diploma ada sebanyak 6 orang atau 16%, berpendidikan strata-1 ada 21 orang atau 55%, berpendidikan strata-2 ada 11 atau 29%, ini menunjukkan bahwa penanggungjawab keuangan pada SKPD sudah berkualifikasi pendidikan sarjana yang dapat diandalkan untuk menunjang tanggung jawab yang diberikan.

Data responden dari posisi jabatan dapat dilihat bahwa, jabatan sebagai kepala/ sekretaris instansi berjumlah 17 orang atau 45%, jabatan sebagai kepala bidang/ kepala bagian ada 11 orang atau 29%, sementara untuk jabatan lain yang bertanggungjawab atas akuntabilitas keuangan sebanyak 10 orang atau 26%. Data responden dilihat dari lama bekerja yaitu sudah bekerja 1 s/d 5 tahun dibidang keuangan tidak ada atau 0%, ada 3 orang atau 8% sudah bekerja 6 s/d 10 tahun, 8 orang atau 21% sudah bekerja 11 s/d 15 tahun, dan ada sebanyak 27 orang responden atau 71% sudah bekerja diatas 16 tahun, ini menunjukkan bahwa rata-rata responden sudah bekerja diatas 10 tahun dan memiliki pengalaman yang cukup dibidang keuangan instansi pemerintah.

#### Hasil Uji Instrumen Penelitian

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah kuesioner. Untuk mengetahui apakah alat ukur (instrumen) yang digunakan berupa butir item pernyataan kuesioner telah mengukur secara cermat dan tepat apa yang diukur pada penelitian ini, data penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan dalam analisis data. Instrumen penelitian dikatakan baik jika memenuhi ketiga persyaratan utama yaitu :1) valid atau sah; 2) reliabel atau handal; 3) praktis, Cooper dan Schindler (2006).

#### Hasil Pengujian Validitas

Uji validitas alat ukur penelitian dilakukan menggunakan pendekatan statistika, yaitu melalui nilai koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor total variabel. Ukuran yang digunakan untuk menyatakan pernyataan valid apabila nilai korelasi skor butir pernyataan dengan skor total variabelnya  $\geq 0,30$ .

Kuesioner penelitian variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) terdiri atas 10 item. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan korelasi *rank spearman* (rs), diperoleh hasil uji validitas variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) Hasil pengujian validitas item kuesioner menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel SAKD ( $X_1$ ) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Kuesioner penelitian variabel Aktivitas Pengendalian ( $X_2$ ) terdiri atas 12 item. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) dapat dilihat dalam tabel berikut. Hasil pengujian validitas item kuesioner pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel aktivitas pengendalian ( $X_2$ ) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

Kuesioner penelitian variabel akuntabilitas keuangan (Y) terdiri atas 10 item. Hasil perhitungan korelasi untuk skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel akuntabilitas keuangan (Y). Hasil pengujian validitas item kuesioner pada tabel 5.5 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam setiap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

memiliki nilai korelasi di atas 0,3 sebagai nilai batas suatu item kuesioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item kuesioner variabel akuntabilitas keuangan (Y) valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti.

**Hasil Pengujian Reliabilitas**

Setelah diperoleh butir item kuesioner yang valid, ukuran lain yang harus dipenuhi suatu alat ukur adalah memiliki tingkat keandalan atau reliabilitas yang baik (tinggi). Suatu alat ukur dikatakan andal bila alat ukur

tersebut digunakan berulang kali akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Pendekatan secara statistika yang dapat digunakan untuk melihat andal tidaknya suatu alat ukur adalah koefisien reliabilitas. Adapun ukuran yang disarankan sebagai dasar secara keseluruhan pernyataan dinyatakan andal (reliabel) adalah apabila koefisien reliabilitas lebih besar dari 0.70.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan metode *Cronbach's Alpha* diperoleh hasil uji reliabilitas data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

Tabel III  
Hasil Pengujian Reliabilitas

| No | Variabel   | Koefisien Reliabilitas | Keterangan |
|----|--|------------------------|------------|
| 1  | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X <sub>1</sub> ) | 0,798                  | Reliabel   |
| 2  | Aktivitas Pengendalian (X <sub>2</sub> )           | 0,782                  | Reliabel   |
| 3  | Akuntabilitas Keuangan (Y)                         | 0,810                  | Reliabel   |

Sumber : Hasil Data Penelitian 2019

Dari tabel 3 diatas diperoleh kesimpulan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keandalan yang baik ( $r > 0.70$ ) sehingga dapat digunakan dalam melakukan analisis guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil uji validitas semua pernyataan valid dan reliabel, yang berarti bahwa data penelitian yang diperoleh dari instrumen yang digunakan layak digunakan mengetahui dan menguji permasalahan yang diteliti.

**Hasil Pengujian Hipotesis Statistik**

Sebelum digunakan sebagai dasar kesimpulan, persamaan regresi yang diperoleh dan telah memenuhi asumsi regresi melalui pengujian di atas perlu di uji koefisien regresinya baik secara keseluruhan (simultan) dan secara

individu (parsial) untuk melihat apakah model yang diperoleh dan koefisien regresinya dapat dikatakan bermakna secara statistik agar dapat diambil simpulan secara umum mengenai pengaruh kompetensi dan skeptisme profesional auditor terhadap kualitas audit.

**Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F-Statistik)**

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukan dalam model secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F diturunkan dari tabel ANOVA (*analysis of variance*).

Hasil perhitungan nilai F-hitung untuk model regresi yang diteliti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV  
Hasil Uji-F

| ANOVA <sup>b</sup> |            |                |    |             |        |                   |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model              |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.              |
| 1                  | Regression | 30262.215      | 3  | 10087.405   | 38.442 | .000 <sup>a</sup> |
|                    | Residual   | 8180.207       | 37 | 221.086     |        |                   |
|                    | Total      | 38442.422      | 40 |             |        |                   |

a. Predictors: (Constant), (X1) SAKD, (X2) Aktivitas pengendalian.  
b. Dependent Variable: (Y) Akuntabilitas keuangan

Sumber : Hasil output SPSS 20.0

Dari hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 38,442 dengan *p-value* sebesar 0,000. Oleh karena *p-value* (0,000) lebih kecil dari nilai  $\alpha$  yang telah ditetapkan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas (sistem akuntansi keuangan daerah) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas (akuntabilitas keuangan) pada tingkat kepercayaan 95%.

**Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t-Statistik)**

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t-statistik. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Nilai t-tabel untuk tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (db) =  $n-k-1 = 37-2-1 = 34$  adalah 1,512.

Hasil perhitungan nilai t-hitung untuk masing-masing variabel bebas dalam model regresi yang diteliti dan hasil keputusan uji parsial disajikan pada tabel berikut:

:

Tabel V  
Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji-t)

| Variabel                 | t-hitung | t-tabel | P-value (Sig) | Keputusan Uji          | Keterangan               |
|--------------------------|----------|---------|---------------|------------------------|--------------------------|
| (SAKD)                   | 2,412    | 1,2131  | 0,018         | H <sub>0</sub> ditolak | signifikan pada α = 0,05 |
| (Aktivitas Pengendalian) | 2,412    | 1,2131  | 0,012         | H <sub>0</sub> ditolak | signifikan pada α = 0,05 |

Keterangan :  
Jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$  : H<sub>0</sub> diterima atau H<sub>a</sub> ditolak  
Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  : H<sub>a</sub> diterima atau H<sub>0</sub> ditolak

**a. Pengaruh SAKD terhadap Akuntabilitas Keuangan.**

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai hitung untuk variabel SAKD (X<sub>1</sub>) sebesar 2,412 dengan *p-value* sebesar 0,018. Oleh karena *p-value* (0,021) lebih kecil dari α yang telah ditetapkan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada tingkat kepercayaan 95 %. Artinya bahwa hasil penelitian ini berhasil menolak H<sub>0</sub>.

**b. Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan**

Dari hasil perhitungan, diperoleh nilai hitung untuk variabel aktivitas pengendalian (X<sub>2</sub>) sebesar 2,412 dengan *p-value* sebesar 0,012. Oleh karena *p-value* (0,012) lebih kecil

dari α yang telah ditetapkan (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada tingkat kepercayaan 95 %. Artinya bahwa hasil penelitian ini berhasil menolak H<sub>0</sub>.

**c. Model Persamaan Regresi**

Untuk melihat pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (X<sub>1</sub>) aktivitas pengendalian (X<sub>2</sub>) terhadap akuntabilitas keuangan (Y), maka digunakan analisis regresi linier berganda. Perhitungan koefisien regresi dilakukan dengan menggunakan *software SPSS 20.0* untuk analisis regresi berganda disajikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel VI  
Hasil Perhitungan Koefisien Regresi Berganda

| Coefficients <sup>a</sup> |            |                             |            |              |       |      |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|--------------|-------|------|
| Model                     |            | Unstandardized Coefficients |            | Standardized | t     | Sig. |
|                           |            | B                           | Std. Error | Coefficients |       |      |
| 1<br>corelation           | (Constant) | 5,321                       | 9.531      |              | .410  | .352 |
|                           | (X1) SAKD  | 1.456                       | .468       | .482         | 3.184 | .002 |
|                           | (X3) AP    | 1.417                       | .468       | .482         | 3.184 | .002 |

a. Dependent Variable: (Y) Akuntabilitas Keuangan  
Sumber : Hasil output SPSS 20.0

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6 di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 5,321 + 1,456 X_1 + 1,417 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar 5,321 berarti bahwa dengan asumsi variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan skeptisme profesional, maka besarnya rata-rata indeks akuntabilitas keuangan bernilai 5,321. Koefisien regresi untuk variabel X<sub>1</sub> positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara sistem akuntansi keuangan daerah (X<sub>1</sub>) dengan akuntabilitas keuangan (Y). Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> yang positif mengandung arti bahwa penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan (Y).

Koefisien regresi untuk variabel X<sub>2</sub> positif, menunjukkan adanya hubungan yang searah antara Aktivitas keuangan (X<sub>2</sub>) dengan akuntabilitas keuangan (Y). Koefisien regresi variabel X<sub>2</sub> mengandung arti bahwa aktivitas keuangan yang dilakukan oleh auditor akan meningkatkan akuntabilitas keuangan.

**Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Besarnya pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi untuk model regresi yang diperoleh. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

| Hasil Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) |   |                   |          |                   |                            |
|---|---|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model Summary <sup>b</sup>                    |   |                   |          |                   |                            |
| Model   |   | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| dimension                                     | 1 | .869 <sup>a</sup> | .756     | .5715             | 12,3234043                 |

a. Predictors: (Constant), (X2) Akitivitas pengendalian (X1) SAKD.  
 b. Dependent Variable: (Y) Akuntabilitas keuangan

Sumber : Hasil output SPSS 20.0

Pada tabel di atas terlihat nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,756, artinya 75,6 % akuntabilitas keuangan dapat dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas keuangan. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 75,6%) = 24,4 % dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

*Pembahasan*

Dari hasil penelitian diperoleh koefisien determinasi (R-Square) sebesar 75.6%, sedangkan faktor lain yang belum diteliti mempengaruhi penelitian ini adalah sebesar 24.4%. Ini berarti bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sementara pengaruh variabel lain yang tidak diteliti sebesar 21.5% seperti kompetensi dan pengalaman kerja pegawai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah kabupaten Aceh Utara. Besarnya koefisien determinasi sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian menunjukkan besarnya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Artinya semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan akuntabilitas keuangan dan semakin tinggi tinggi aktivitas pengendalian maka semakin tinggi akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini juga menggambarkan bahwa dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian harus dilakukan dengan secara menyeluruh dan lengkap, agar semua SKPD yang berada dibawah pemerintahan kabupaten Aceh Utara dapat menghasilkan laporan akuntabilitas keuangan sesuai dengan standar dapat bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan dan stakeholder. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurhayati S (2011).

V. PENUTUP

*Kesimpulan*

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta temuan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintah di Kabupaten Aceh Utara.
2. Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintah di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat diartikan bahwa baik sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian maka akan semakin baik kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

*Saran*

1. Aparatur pemerintah harus selalu meningkatkan sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan (training), agar akuntabilitas keuagan pemerintah daerah dapat lebih baik.
2. Bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik melakukan penelitian tentang akuntabilitas keuangan, disarankan untuk dapat menggali faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi terhadap akuntabilitas keuangan misalnya kompetensi, pendidikan dan pengalaman kerja.

REFERENSI

- [1] Arens, Alvin A., Elder, Randal J and Beasley, Mark S, 2015, "Auditing and Assurance Services – An Integrated Approach", Eleventh Edition, Pearson Education.
- [2] Abdul Halim, 2012, "Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah", Salemba Empat'
- [3] Abdul Halim dan Theresia Damayanti, 2017, "Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah", UPP STIM YKPN.
- [4] Agus Dwiyanto, Arfani, Hadna, dkk, 2013, "Governance Practices and Regional Autonomy: Evidences from Governance and Decentralization Survey (GDS) 2002", Yogyakarta: Partership for Governance Reform in Indonesia and World Bank.
- [5] Azhar Susanto, 2013. Sistem Informasi Akuntansi. Penerbit Linggar Jaya.
- [6] Dadang Suwanda, 2015. Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah: Berpedoman SAP Berbasis Akrual. Penerbit PPM Indonesia.
- [7] Harahap Syafri Sofyan, 2014, "Sistem pengawasan manajemen (management Control System)". Cetakan kedua. Jakarta. Pustaka Quantum.
- [8] Husein Umar, 2013, "Metode Riset Akuntansi Terapan", Ghalia Indonesia
- [9] Indra Bastian, 2007, "Sistem Akuntansi Sektor Publik", Edisi 2, Jakarta, Salemba Empat.
- [10] Indra Bastian, 2010, "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", Erlangga
- [11] Ismail Mohamad, dkk, 2014, "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", Edisi kedua. <http://www.lan.go.id>
- [12] Mardiasmo, 2009, "Akuntansi Sektor Publik", Andi Yogyakarta
- [13] Nunuy Nur Afiah, 2013, "Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah", Kencana.
- [14] Nurhayati Soleha, (2011), Pengaruh Sistem Akutansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. Tesis Unpad, Bandung.
- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- [16] \_\_\_\_\_, Nomor 59 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000. Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- [18] \_\_\_\_\_, Nomor 24 Tahun 2005. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- [19] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara